

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Legitimacy Theory

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), teori legitimasi berfokus terhadap hubungan antar perusahaan dan masyarakat sebagai faktor penentu pengembangan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Teori legitimasi atau legitimacy theory merupakan teori yang mengungkapkan pentingnya memperhatikan hak-hak masyarakat selain hak-hak investor bagi perusahaan. Perusahaan harus beroperasi sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mendapat persetujuan usaha dan dianggap oleh masyarakat sebagai perusahaan yang tidak melanggar hukum Rusmaningsih & Setiadi, (2021).

Namun, norma senantiasa berubah dari waktu ke waktu dan membuat perusahaan dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian dalam setiap perubahan tersebut. Wujud nyata tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh legitimasi adalah dengan melakukan tindakan untuk menjaga lingkungan dan melaksanakan kegiatan sosial (Luthan et al., 2018). Menurut Supadi dan Sudana (2018) perusahaan perlu untuk memperkuat legitimasi di mata masyarakat agar dapat memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat menjadi keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Legitimasi dapat

tercipta akibat dari adanya kesesuaian antara keinginan masyarakat dengan aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat dapat menaikkan citranya dan meningkatkan kinerja keuangannya

Irfansyah et al., (2018) menyatakan bahwa, teori Legitimasi pertama kali diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975, yang mendefinisikan teori ini sebagai suatu kondisi di mana entitas menciptakan harmoni dengan kelompok sosial yang mereka ikuti. Teori ini menekankan pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat Deegan, (2002). Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa sebuah organisasi berusaha menyelaraskan nilai-nilai sosial yang melekat pada aktivitasnya dengan norma-norma perilaku dalam sistem sosial di mana organisasi tersebut berada.

Perusahaan berusaha mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Operasi perusahaan harus sesuai dengan batasan dan norma yang diterima oleh masyarakat. Ada kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, di mana stakeholder mengharapkan perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan, baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. Contohnya termasuk tanggung jawab perusahaan dalam daur ulang limbah, pengelolaan limbah pabrik, penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat, dan pemberian beasiswa.

Oleh karena itu, penerapan taktik atau tindakan legitimasi dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan dalam lingkungan yang berubah. Menurut Zullaekha (2020), pengungkapan dalam laporan tahunan adalah upaya perusahaan

untuk mengkomunikasikan aktivitas lingkungan mereka guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat sesuai dengan prinsip keberlanjutan usaha. Zullaekha (2020) juga menyatakan bahwa perusahaan yang secara sukarela dan transparan mengungkapkan laporan lingkungan mereka akan diakui oleh para stakeholder sebagai entitas yang menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Dampaknya, kepercayaan stakeholder terhadap produk perusahaan meningkat, sehingga mereka lebih cenderung membeli produk tersebut. Penjualan produk yang meningkat ini kemudian berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.2 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan diartikan sebagai kinerja suatu perusahaan yang dinilai atas kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Kinerja lingkungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika ingin meraih kesuksesan bisnis Meiyana, *at all*, (2020), Kinerja lingkungan merupakan parameter yang menunjukkan bagaimana kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan akan dinilai baik ketika perusahaan menjaga sumber daya dan lingkungan sekitar perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang baik akan membuat perusahaan terhindar dari tuntutan masyarakat sehingga perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya (Suaidah & Putri, 2020).

Kinerja lingkungan menurut Meiyana dan Aisyah (2019) merupakan pengungkapan mengenai tingkat kepedulian perusahaan dalam mengatasi dampak

lingkungan yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Kinerja lingkungan yang baik akan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan keandalan perusahaan. Di Indonesia ada cara tersendiri untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk suatu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang sudah dijalankan sejak tahun 2002. Program ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perusahaan untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan Meiyana dan Aisyah, (2019).

Menurut Siregar et al (2019) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) adalah program yang diciptakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk:

- a. Mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaannya dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui insentif dan disinsentif reputasi.
- b. Memotivasi perusahaan yang sudah memiliki kinerja lingkungan yang baik untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production) sepanjang perusahaan beroperasi.

Penilaian PROPER yang dilakukan terhadap perusahaan akan membuat reputasi perusahaan sebanding dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Penilaian PROPER dinilai dengan parameter warna yang

terklasifikasi ke dalam warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1
Keterangan Sistem Peringkat PROPER

Indikator Warna	Keterangan
Emas	Konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan pelayanan, serta menjalankan bisnis yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Melakukan manajemen lingkungan yang melebihi persyaratan yang diatur oleh peraturan (beyond compliance) dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan menjalankan tanggung jawab sosial secara efektif.
Biru	Melakukan usaha untuk mengelola lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada.
Merah	Melakukan langkah-langkah untuk mengelola lingkungan, namun belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
Hitam	Dengan sengaja melakukan tindakan atau kecerobohan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan/atau tidak menjalankan sanksi administratif..

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, PROPER merupakan alat untuk melakukan evaluasi mengenai ketaatan dan kinerja perusahaan melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan dibidang pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam pelaksanaan

program ini, dilakukan terhadap usaha sebagaimana tertuang dalam Permenlh No. 3 Tahun 2014 Pasal 3 adalah :

- A. Hasil produknya untuk tujuan ekspor.
- B. Terdapat dalam pasar bursa.
- C. Menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional.
- D. Skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Apabila suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya termasuk dalam kegiatan yang dimaksud dalam pasal tersebut, maka perusahaan dianjurkan untuk mendaftarkan usahanya mengikuti program PROPER. Pada program ini, hal yang menjadi penilaian ketaatan dilakukan pada aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permenlh No. 3 Tahun 2014 yaitu:

- A. Pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan.
- B. Pengendalian pencemaran air.
- C. Pengendalian pencemaran udara.
- D. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- E. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Dilaksanakannya PROPER merupakan bukti bahwa perusahaan memang memiliki keterikatan erat dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

hidup Nomor 32 Tahun 2009 pasal 57 dijelaskan bahwa bentuk-bentuk pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan melakukan konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan melakukan pelestarian fungsi atmosfer.¹

2.1.3 Biaya Lingkungan

Dijelaskan pula oleh Wulaningrum & Kusrihandayani, (2020) bahwa Biaya Lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat adanya system pengelolaan lingkungan yang buruk disebabkan karena proses produksi perusahaan yang buruk. Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, system atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik (Mariani, 2017). Biaya lingkungan meliputi biaya yang berhubungan dengan proses proses yang berdampak pada lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan dalam kegiatan perusahaan.

Biaya lingkungan dapat dilihat pada alokasi dana untuk program bina lingkungan yang tercantum dalam laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Biaya lingkungan dihitung dengan membandingkan dana program bina lingkungan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Klasifikasi Biaya Lingkungan Menurut Hansen & Mowen Hansen & Mowen, (2009) biaya lingkungan dapat dibagi sebagai berikut:

¹ <https://proper.menlhk.go.id/proper/>

1. Biaya pencegahan lingkungan yang dikeluarkan untuk mencegah timbulnya sampah maupun limbah yang akan merusak lingkungan;
2. Biaya deteksi lingkungan, dikeluarkan untuk mengetahui process, product, and activity sudah sesuai dengan standar atau belum. Standar lingkungan tersebut adalah peraturan pemerintah, ISO 14001, dan kebijakan lingkungan.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan yang dikeluarkan karena memproduksi sampah dan limbah tapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Dengan tujuan memastikan limbah sampah tidak dibuang ke lingkungan luar dan dapat berkurang agar tidak melebihi standar lingkungan.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan dikeluarkan setelah meluruhkan limbah sampah ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi biaya yang terealisasi yang dirasakan dan harus dibayar oleh perusahaan dan tidak terealisasi yang dibayar dan dialami oleh pihak luar perusahaan namun penyebabnya adalah perusahaan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu, termasuk penganggaran biaya lingkungan. Dalam buku Hansen & Mowen (2009), terdapat lima tujuan utama dari perspektif lingkungan, yaitu:

1. Meminimalkan penggunaan bahan baku atau material asli.
2. Meminimalkan penggunaan bahan berbahaya.

3. Meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk.
4. Meminimalkan pelepasan residu padat, cair, dan gas.
5. Memaksimalkan peluang untuk daur ulang.

Biaya lingkungan ini dapat dilihat dalam alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan yang tercantum dalam laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan. Penghitungan biaya lingkungan dilakukan dengan membandingkan dana yang dialokasikan untuk program bina lingkungan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan, sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Babalola (2017).

$$\text{Environmental Cost} = \frac{\text{CSR Activity Fee}}{\text{Net Profit}}$$

Sumber : (Miladiasari, 2020)

Menurut (Wirmaningsih & Setiawan, 2022) EC diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR dengan keuntungan perusahaan.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Menurut Luh et al (2017) kinerja keuangan perusahaan menjelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan sudah dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan manajemen. Kinerja keuangan yang baik merupakan bukti prestasi perusahaan yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari terciptanya kinerja keuangan yang baik adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham yang sudah melakukan investasi di dalam perusahaan. Dengan demikian, untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan maka perusahaan harus mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan para pemegang saham. Pemegang saham melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan bagaimana kondisi pemegang saham pada akhir periode dengan kondisi pemegang saham pada awal periode.

Laba berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat membuat perusahaan mencapai tujuan-tujuan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu disebut profitabilitas (Supadi & Sudana, 2018). Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Setiap jenis rasio memberikan wawasan tertentu tentang posisi yang diinginkan perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis rasio keuangan menurut Kasmir, (2017) :

a. Rasio Likuiditas

Fred Weston (1996) menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Artinya, jika perusahaan menerima penagihan, ia harus mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo (Kasmir, 2017).

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. Ini berarti rasio solvabilitas menunjukkan besarnya beban hutang perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya.

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang ada. Rasio ini juga mengukur efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan dalam bidang penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan bidang lain.

d. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan dan investasi. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas meliputi:

1. **Profit Margin on Sales:** Rasio ini menilai margin laba atas penjualan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.
2. **Return on Asset (ROA):** Rasio ini menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang dikelola perusahaan.
3. **Return on Equity (ROE):** Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak perusahaan terhadap ekuitasnya,

mengindikasikan efisiensi pengelolaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai rasio, semakin baik kondisi perusahaan dan kuatnya posisi pemilik.

4. **Laba Per Lembar Saham:** Rasio ini mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target laba bagi pemegang saham.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi. Aspek yang dianalisis mencakup pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham pada periode tertentu.

f. Rasio Penilaian

Rasio penilaian (valuation ratio) adalah rasio yang menjelaskan mengenai ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya atas biaya investasi, seperti :

1) **Rasio Harga Saham Terhadap Pendapatan**

Rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham adalah rasio valuasi harga saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya.

2) **Rasio Nilai Pasar Saham Terhadap Nilai Buku**

Rasio pasar harga saham terhadap nilai buku memberikan pandangan kepada investor bahwa perusahaan dapat dianggap baik ketika perusahaan mampu menghasilkan laba dan arus kas dengan baik. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang dapat meningkatkan laba dinilai mampu melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien.

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa laba senantiasa meningkat. Peningkatan atau penurunan laba akan mencerminkan kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan Putri et al, (2019). *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka kinerja keuangan perusahaan dinilai semakin baik. Hal ini juga dapat mengartikan bahwa perusahaan mampu melakukan pengelolaan setiap aset sehingga menghasilkan keuntungan. Dalam mengukur ROA dapat digunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: (Miladiasari, 2020)

2.1.5 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen. GCG merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan wewenang yang dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan hidupnya serta akuntabilitasnya kepada pemegang saham. Manfaat utama penerapan GCG bagi perusahaan adalah memperoleh kepercayaan dari investor dan publik, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas dan kinerja perusahaan Wahyukusuma, (2009). GCG menyediakan pedoman yang memungkinkan pengawasan efektif atas operasional perusahaan. Menurut Sutojo dan Aldridge, GCG memiliki lima tujuan utama sebagai berikut:

- A. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- B. Melindungi hak dan kepentingan stakeholder non-pemegang saham.
- C. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham.
- D. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
- E. Meningkatkan kualitas hubungan antara dewan pengurus dan manajemen perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyatakan beberapa manfaat GCG, yaitu:

- A. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses pengambilan keputusan yang baik.
- B. Mempermudah akses terhadap dana pembiayaan yang lebih murah dan meningkatkan nilai perusahaan.
- C. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
- D. Mengurangi biaya modal pengelolaan perusahaan.
- E. Meningkatkan harga saham perusahaan dan citra publik perusahaan.
- F. Menciptakan dukungan dari stakeholder.
- G. Meningkatkan efisiensi perusahaan.

Dalam penelitian ini, karakteristik good corporate governance yang digunakan merujuk pada studi yang dilakukan oleh Alfa Vivianita dan Febriana (2017), yang diproksikan melalui ukuran dewan komisaris independen dengan menggunakan rumus berikut:

$$GCG = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Sumber: (Miladiasari, 2020)

2.2 Riset Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan (X1) Terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Menurut Novianto et al. (2019), Kinerja Lingkungan mengacu pada bagaimana perusahaan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Kinerja lingkungan dinilai dalam bentuk peringkat oleh lembaga terkait lingkungan hidup, seperti PROPER, yang merupakan program pemeringkatan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini menilai kinerja lingkungan tiap perusahaan untuk dibandingkan dan dijadikan bahan evaluasi.

Kinerja lingkungan yang baik akan mendapat respons positif dari investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan; hubungan keduanya saling mempengaruhi secara timbal balik, yang kemudian berdampak positif pada laba dan pendapatan perusahaan yang diindikasikan oleh kinerja keuangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al., (2022) menyatakan bahwa, Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.. Penelitian yang dilakukan oleh Handoko & Santoso, (2023) menyatakan bahwa, Kinerja Lingkungan secara sebagian memiliki kaitan dengan kinerja Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Amani et al., (2020) menyatakan bahwa, Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul, (2023) menyatakan bahwa, Kinerja Lingkungan tidak terdapat pengaruh parsial dan

signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

H1: Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2.2.2 Pengaruh Biaya Lingkungan (X2) Terhadap Kinerja (Y).

Biaya Lingkungan merujuk pada semua biaya yang terjadi baik secara internal maupun eksternal perusahaan yang terkait dengan kerusakan atau perlindungan lingkungan. Menurut Hansen dan Mowen (2000), biaya lingkungan mencakup semua biaya yang terkait dengan penciptaan, deteksi, remediasi, dan pencegahan penurunan kualitas lingkungan. Dengan demikian, biaya lingkungan memberikan kerangka kerja untuk tanggung jawab lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh studi Lastri Meito Nababan (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara biaya lingkungan dan kinerja keuangan. Namun, beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Ryan Risky Mustika (2017), menyatakan sebaliknya, bahwa biaya lingkungan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Biaya lingkungan hidup berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur sektor industri

barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2.2.3 Pengaruh Kinerja Lingkungan (X1), Terhadap Kinerja Keuangan (Y), dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (M).

Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan mengelola aktivitas perusahaan serta hubungannya dengan para pemangku kepentingan internal perusahaan. Salah satu fungsi utama dari mekanisme ini adalah untuk memantau bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya, apakah sesuai dengan kontrak sosialnya dengan para pemangku kepentingan atau tidak. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik kemungkinan lebih mampu mengadopsi praktik lingkungan yang efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian oleh Miladiasari (2020) dan Alva Vivianita (2019) menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan pengungkapan kinerja lingkungan dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan kontrol dalam tata kelola perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H3: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap dampak Kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2.2.4 Pengaruh Biaya Lingkungan (X2), Terhadap Kinerja Keuangan (Y), dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (M).

Biaya Lingkungan yang dialokasikan atau dianggarkan oleh suatu perusahaan memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, salah satunya adalah untuk mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Implementasi GCG menjadi penting karena diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, mempromosikan pengambilan keputusan yang efektif, serta mencegah perilaku oportunistik yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

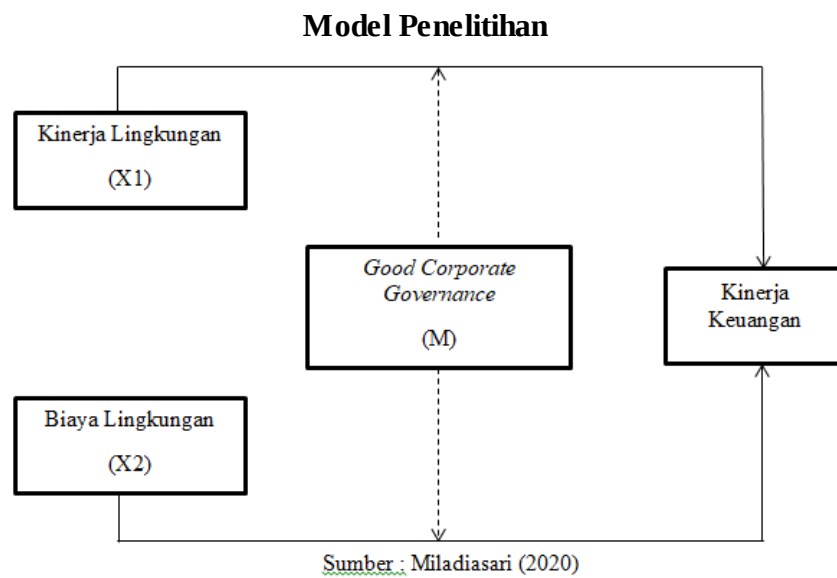
Penerapan GCG yang konsisten diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, terutama investor dan kreditur. Perusahaan dengan praktik GCG yang baik kemungkinan lebih mampu mengelola biaya lingkungan dengan efisien, yang kemudian dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H4: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap biaya lingkungan pada keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan berberpa penjelasan yang ditulis sebelumnya, dan permasalahan yang akan diteliti, maka model penelithan dalam penelitian ini akan digambar sebagai berikut:

Gambar 2.1



Keterangan:

X : Variabel Independen

Y : Variabel Dependen

M : Variabel Moderasi